



**RENSTRA
BIRO
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SETDA MALUKU**

Tahun Anggaran 2019 - 2024

PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Maluku.

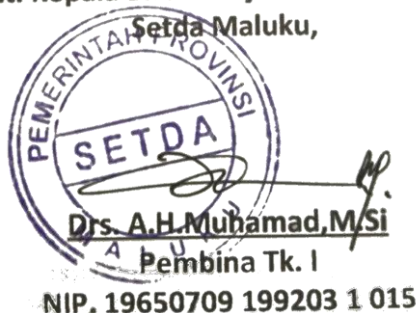
Penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesra, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku selama tahun 2019-2024.

Kepada Tim Penyusun Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga Renstra ini dapat diselesaikan. Akhir kata, kritikan dan saran dari pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini.

**Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Maluku,**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR _____	i
DAFTAR ISI _____	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Landasan Hukum _____	3
1.3. Maksud dan Tujuan _____	5
1.4. Sistematika Penulisan _____	5
BAB II GAMABARAN PELAYANAN BIRO KESRA SETDA MALUKU	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kesra _____	7
2.2 Sumber Daya Biro Kesra _____	10
2.3. Kinerja Pelayanan Biro Kesra _____	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesra _____	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO	
KESRA	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Biro Kesra _____	23
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih _____	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi _____	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis _____	34
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis _____	34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesra _____	36
-----	---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi dan Kebijakan Biro Kesra _____	40
-----	---	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN _____ 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD _____	52
-----	---	----

BAB VIII PENUTUP _____ 55

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan transparan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Penetapan Renstra OPD merupakan langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan yang baik. Penetapan Renstra OPD ini merupakan hal yang strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berkenaan dengan hal di atas lebih lanjut kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman bagi masing-masing OPD dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Renstra OPD disusun mengacu kepada RPJM daerah, dan merupakan bentuk perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan aspek-aspek strategis dan lebih operasional dari RPJMD itu sendiri.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024 disusun mengacu kepada tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku telah mengacu pada sistematika penyusunan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) merupakan salah satu OPD dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum Sekda Maluku sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan yang menyangkut sosial kemasyarakatan.

Untuk mendukung RPJM Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku ikut memberikan andil lewat program dan kegiatan yang direncanakan pada Renstra 2019 – 2024 yang diselaraskan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Maluku, Jambi dan Riau sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
16. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Provinsi Maluku.
17. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan mengarahkan seluruh dimensi dan potensi yang dimiliki Biro Kesra Setda Provinsi Maluku, dengan mengintegrasikan seluruh kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai visi, misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program kegiatan pada Biro Kesra Setda Provinsi Maluku
2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Loyalitas personil terhadap pimpinan dalam mendukung tercapainya kinerja yang maksimal;
4. Menyelaraskan program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas prioritas pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan koordinasi kepada OPD dan Stakholder terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran;
6. Meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan dengan memfasilitasi antar sektor dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Tujuan

Secara spesifik tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada
2. Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dari kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dengan stakeholder
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, kronologis dan berkelanjutan secara sinergis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Pelayanan yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku sebagai OPD yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, pada pelaksanaannya berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Biro sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku; Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku yang merupakan salah satu dari Biro dibawah Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok ***membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan Pengkoordinasian Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan pelayanan dasar.***

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual,

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan rincian tugas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Kerja di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas
2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dan Kebijakan Pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Menetapkan penyiapan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Menetapkan penyiapan pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menetapkan pelaksanaan program layanan ketatausahaan Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Menetapkan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelayanan, pengembangan dan tata usaha di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyelenggarakan pengoordinasi dengan unit kerja terkait; dan

9. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku terdiri dari :

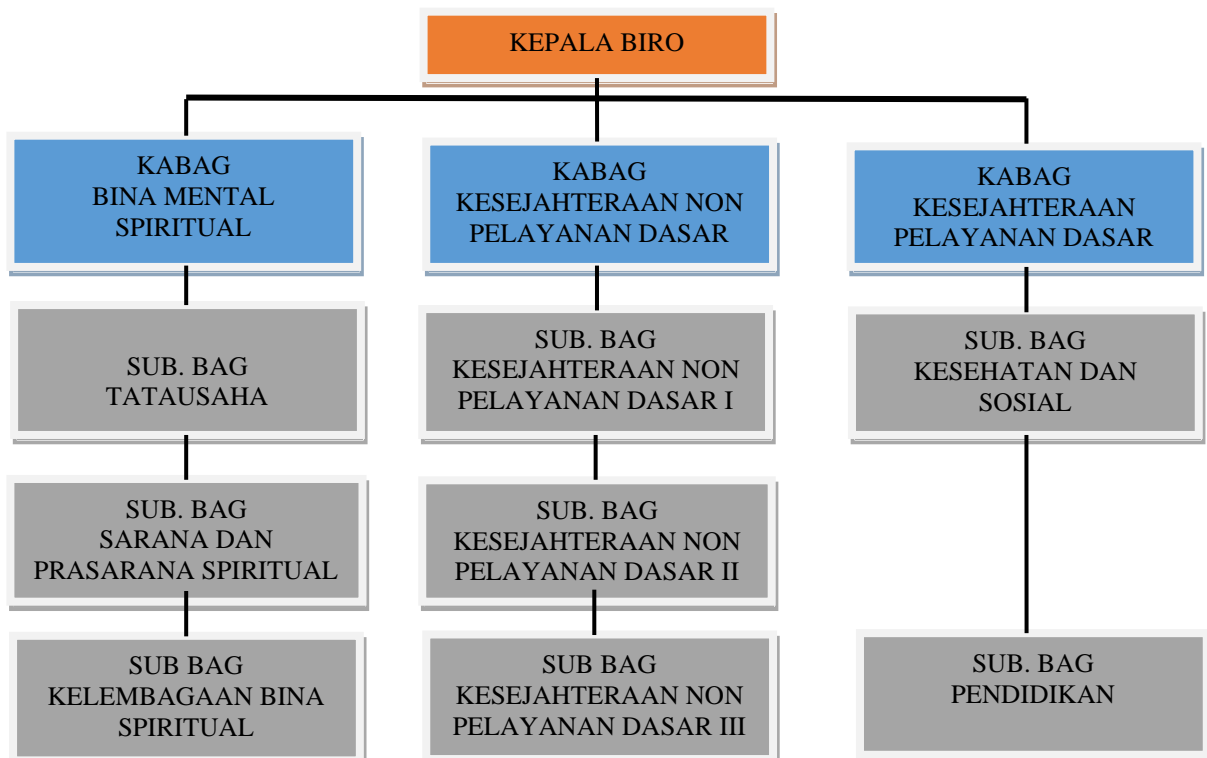
1. Kepala Biro
2. Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 2.2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
 - 2.3. Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual;
3. Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar;
 - 3.1. Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I;
 - 3.2. Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II;
 - 3.3. Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III;
4. Bagian Kesejahteraan Pelayanan Dasar :
 - 4.1. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial;
 - 4.2. Sub Bagian Pendidikan.

Sebagai ilustrasi dapat ditampilkan bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku secara lengkap seperti gambar 2.1 berikut :

BAGAN

2.1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU



2.2 SUMBER DAYA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus didukung oleh bagaimana kesiapan kondisi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku di dalam, yang dapat berupa unsur-unsur seperti sarana dan prasarana, potensi atau SDM personil yang ada, juga kebijakan yang dilahirkan. Pada intinya unsur atau komponen tersebut saling sinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Kesra per tanggal 1 September 2021 berjumlah 31 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Honorer, sedangkan untuk rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan.

Klasifikasi PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku per 1 September 2021 menurut Tingkat Pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Tingkat Pendidikan Strata 2	4	
2.	Tingkat Pendidikan Strata 1	11	
3.	Tingkat Pendidikan D3/ sederajat	1	
4.	Tingkat Pendidikan SLTA/ sederajat	8	
	J u m l a h	24	

2. Keadaan PNS Menurut Golongan dan Kepangkatan

Klasifikasi PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku per 1 September 2021 menurut Golongan dan Kepangkatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Keadaan PNS Menurut Golongan dan Kepangkatan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b	1
3.	Pembina	IV / a	1
4.	Panata Tingkat I	III / d	7
5.	Penata	III / c	4
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b	5
7.	Penata Muda	III / a	2
8.	Pengatur Tingkat I	II / d	1
9.	Pengatur	II / c	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	1
J u m l a h			24

3. Keadaan PNS Menurut Jenjang Pendidikan dan Pelatihan

Klasifikasi PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku per 1 September 2021 menurut Jenjang Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Keadaan PNS berdasarkan Diklat Penjurangan

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sepamen / Diklatpim Tingkat II	-	
2.	Sepama / Diklatpim Tingkat III	3	
3.	Sepala/Adumla/Diklatpim Tingkat IV	5	
J u m l a h		8	

4. Keadaan PNS Menurut Tingkat Esselonisasi Klasifikasi PNS Biro Kesejahteraan Setda Maluku per 1 September 2021 menurut Tingkat Pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 2.4

Keadaan PNS menurut Tingkat Esselonisasi

No	Esselonisasi	Jumlah
1	Eeselon II b	1
2	Eeselon III a	3
3	Eeselon IV a	8
Jumlah		12

2.2.2 Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

**SARANA DAN PRASARANA BIRO
KESRA PER 1 September 2021**

No. Urut	Spesifikasi Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mesin Tik	Buah	RB	1
2	Lemari TV	Buah	RB	1
3	Lemari Arsip Besar	Buah	B	5
4	Lemari Arsip Kecil	Buah	B	5
5	Lemari Besi	Buah	B	3
6	Filling Cabinet Kayu	Buah	B	5
7	Meja Biro	Buah	B	1
8	Kursi	Buah	B	1
9	Meja Staf	Buah	B	31
10	Kursi Staf	Buah	B	31
11	TV	Buah	B	2
12	AC Split	Unit	B	3
13	AC Berdiri	Unit	B	1
14	Laptop	Unit	B	5
15	Roda 4	Buah	B	1
16	Roda 2	Buah	B	3

2.3 KINERJA PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, selain melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi) sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, juga urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam bidang sosial, budaya, agama, kesehatan, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Implementasi dan aplikasi dari Tupoksi tersebut diwujudkan kedalam program dan kegiatan yang secara umum berorientasi kepada tercapainya target realisasi kegiatan penyelenggaraan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Menuju arah yang diinginkan tersebut di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku melaksanakan koordinasi, interaksi dengan OPD dan Stakeholders terkait. Koordinasi dan interaksi dapat berupa pelayanan dalam bentuk melakukan pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi jalannya kegiatan yang dikelola oleh Stakeholders tersebut. Selain itu program dan kegiatan yang dikelola OPD dan Stakeholders terkait agar mencapai sasaran, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku juga melaksanakan pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk tanggungjawab kepada Gubernur.

Kinerja pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Berikut adalah capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembinaan bagi organisasi/lembaga keagamaan
2. Terfasilitasinya tokoh agama dalam mengikuti Ibadah Umrah dan Wisata Rohani
3. Terlaksananya koordinasi dan sinergitas bidang keagamaan
4. Terfasilitasinya bantuan Hibah dan Bansos kepada Kelompok masyarakat/ masyarakat.
5. Terlaksananya koordinasi dan sinergitas bidang Pendidikan dan Sosial & Kesehatan
6. Terlaksananya koordinasi dan sinergitas bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan

Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan.

7. Terwujudnya sinergitas bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan.

8. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai Tupoksi

Untuk mencapai hal tersebut di atas perlu didukung oleh kondisi internal Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku yang solid, hal ini mengingat adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja personil dalam penyelenggaraan tugas selain faktor yang berasal dari dalam sendiri. Untuk itu Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku akan lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disiplin kerja untuk menuju keberhasilan pencapaian kinerja. Selain itu juga perlu didukung oleh :

1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Membentuk pola pikir dan budaya kerja pada organisasi;
3. Perlu adanya komitmen yang kuat dengan OPD dan Stakeholders dalam pelaksanaan kegiatan yang saling bersinergi;
4. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja.

Tabel 2.6
Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku
Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Keikutsertaan Aparatur pada pendidikan dan pelatihan teknis		100 %		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00	
2	Tereksposnya hasil pembangunan KB daerah Maluku dalam pameran pembangunan		100 %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Terbinanya para eks penyandang penyakit sosial		100 %		100	100	100	100		100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	1.00	
4	Tersedianya Protein hewani bagi masyarakat miskin		100 %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama		100 %			100	100	100	100		98,4	100	100	71,5		0,98	1.00	1.00	0,71
6	Meningkatnya Harmonisasi Kehidupan beragama		100 %			100	100	100	100		100	100	100	86,9		1.00	1.00	1.00	0,86
7	Meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat		100%			100	100	100	100		100	100	100	95,1		1.00	1.00	1.00	0,95
8	Terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai UU ketenagakerjaan		100 %			100	100		100		100	100		100		1.00	1.00		1.00
9	Memantapkan SDM dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi		100 %			100	100	100	100		100	100	94	75		1.00	1.00	0,94	0,75
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		100 %			100	100				93,7	100				0,93	1.00		
11	Kesadaran masyarakat tentang hidup sehat		100 %						100					100					1.00

Pada Tabel 2.6 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Pada konteks analisis penyebab keberhasilan ASN dalam mengikuti Pendidikan Pelatihan Teknis dari tahun ke tahun dapat direalisasi dengan baik. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam kurun waktu 5 tahun dapat berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Maluku

2. Pembangunan Keluarga Berencana

Pada konteks analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dalam presentase Partisipasi masyarakat khususnya Industri Kecil Menengah dapat menyumbangkan nilai pembangunan dalam hal memproduksi hasil-hasil kerajinan yang mengangkat harkat martabat dari Provinsi Maluku dalam ajang Nasional teristimewa dalam Pameran yang mengedepankan Pembangunan Daerah.

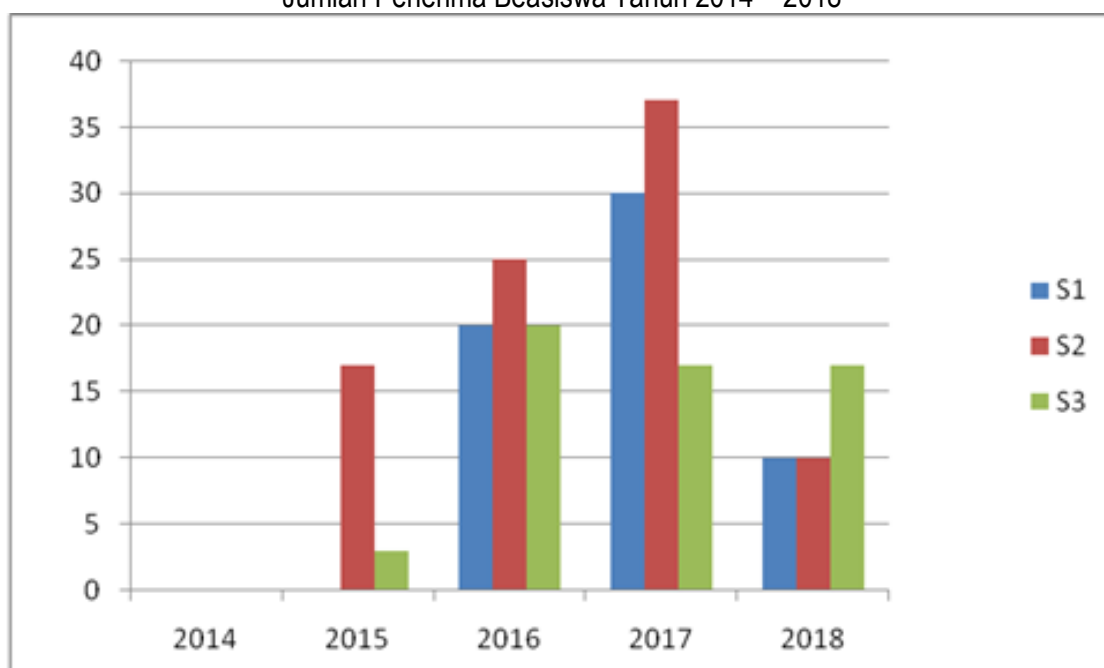
3. Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat provinsi Maluku dapat dilihat dalam taraf waktu 5 (lima) tahun yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jikalau ada penurunan presentase, itu hanya disebabkan oleh faktor kuantitas yang tidak mempengaruhi faktor kualitas presentase kesehatan masyarakat yang semakin membaik dari tahun ke tahun terutama untuk penyakit sosial.

4. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berikhtiar untuk pembangunan Maluku dapat dilihat dalam presentase beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk para Mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan baik tingkat S1, S2 dan S3.

Tabel 2.6.1
Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2014 – 2018



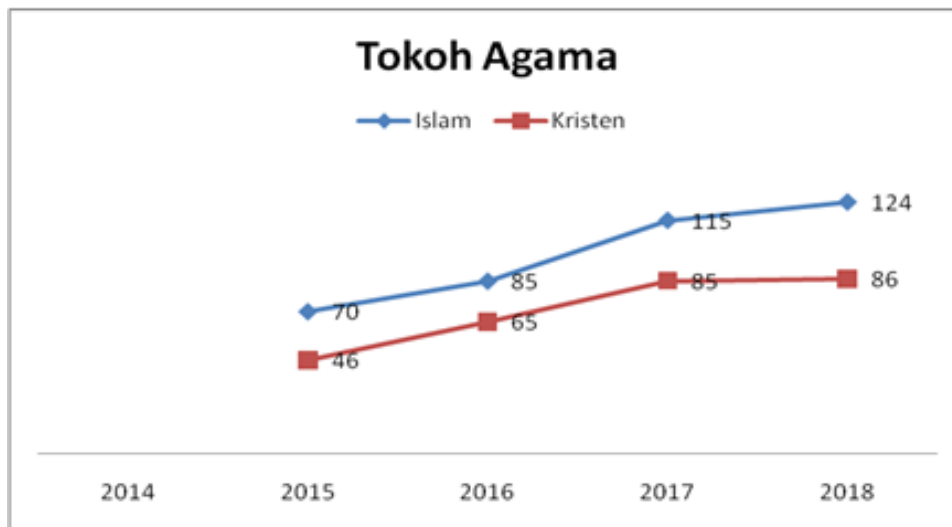
Dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2014 belum ada Program Kegiatan ini dan Tahun 2018 terjadi penurunan presentase dikarenakan ada beberapa mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Studinya.

5. Peran Tokoh Agama

Sebagai bentuk memperkuat iman dan ketaqwaan umat pemerimtah daerah memfasilitasi ibadah umroh dan wisata rohani bagi tokoh-tokoh agama di Maluku. Tokoh agama yang telah diikuti pada program ini. Proses identifikasi tokoh agama pemerimtah daerah melibatkan lembaga-lembaga keumatan untuk kemudia memberikan rekomendasi terhadap setiap tokoh agama

Proses yang melibatkan lembaga-lembaga keumatan menjadikannya sebagai salah satu instrument penguatan koordinasi antar pemerintah dan lembaga keumatan. Apresiasi yang diberikan pemerintah bagi para tokoh agama, sekaligus menjadi motovasi dalam bagi para tokoh agama untuk secara bersama-sama dan bergandengan tangan meningkatkan ketaatan umat sehingga akan menciptakan keharmonisan dan toleransi antara umat di daerah

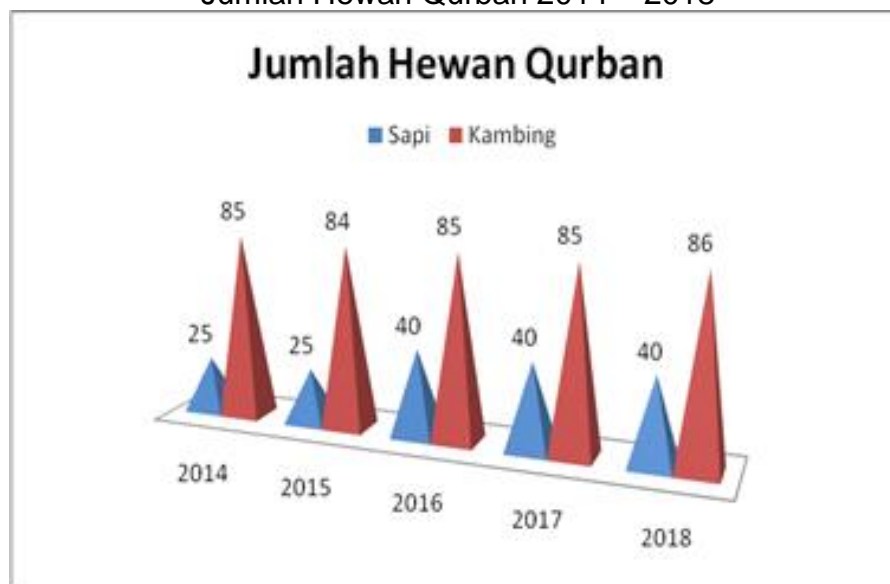
Tabel 2.6.2
Jumlah Tokoh Agama 2014 – 2018



6. Hewan Qurban

Pada konteks ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan bagian Iman dari Masyarakat Provinsi Maluku. Salah satu partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah membagikan Hewan Qurban berupa Sapi dan Kambing yang pada realisasinya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri yang di salurkan melalui Masjid – Masjid yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Maluku. Adapun Jumlah Hewan Qurban yang diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.3
Jumlah Hewan Qurban 2014 – 2018



Upaya pencapaian sasaran melalui penetapan indikator kinerja diatas telah dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluu melalui berbagai langkah

kebijakan yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan dengan pengukuran kinerja yang secara lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.2. Realisasi Anggaran

Secara umum Anggaran Belanja Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2014-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku
 Tahun Anggaran 2014 - 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan Rp. (000)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.765	382.700	513.697,2	363.784	604.905	470.095	369.554,3	448.124,9	343.968	550.066	0,99	0,97	0,87	0,95	0,90	2.341.851	2.181.808
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		47.140	37.500,8	2.086.280	47.984		46.770	35.871,8	1.995.080	47.984		0,99	0,95	0,95	1,00	2.218.905	2.125.706
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	150.401	194.500	107.552	84.337		112.404	190.903,3	107.552	83.789		0,75	0,98	1,00	0,99		536.790	494.648
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	150.000	150.000	390.600	242.940	453.302	130.565,7	139.023,4	359.694,4	239.640	412.855,5	0,87	0,94	0,92	0,98	0,91	1.386.842	1.281.779
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		5.729.000	7.796.403	8.149.398	8.519.358		5.406.710,6	7.453.165,5	7.694.971	7.964.971		0,94	0,96	0,98	0,97	30.194.159	28.519.808
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		77.800	224.526		114.561		73.300	182.557		113.761		0,94	0,81		0,99	416.887	369.618
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	141.920	170.200	172.672			126.849	156.108	157.383,2			0,89	0,92	0,91			484.792	440.340
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	397.500	400.000	655.000	659.752	674.752	397.500	400.000	655.000	659.752	674.752	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.787.004	2.787.004
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		299.282	3.808.828,2	3.491.831	3.058.547		203.744	3.226.505,3	3.035.670	2.198.611		0,68	0,85	0,86	0,75	10.658.488	8.664.530
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		215.456	225.004				179.456	215.270,4				0,83	0,96			440.640	394.726
Program Pelayanan Kontrasepsi			134.030					103.786					0,77			134.030	103.786
Program Pencegahan Penyakit Menular			292.067					213.128					0,73			292.067	213.128
Program Pengembangan Nilai – Nilai Keagamaan			156.000	260.752	383.140			151.250	250.829	333.107			0,96	0,96	0,86	799.892	735.186
Program Pendampingan bagi Masyarakat Rawan Sosial Ekonomi			102.230					96.287,5					0,94			102.230	96.287,5
Program Pengembangan Lingkungan Sehat					114.561					113.761					0,91	114.561	113.761

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku banyak hal dapat diaplikasikan untuk melakukan pengendalian, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan bidang bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan.

Namun di dalam pelaksanaannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara optimal tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi, baik fadengan OPD pelaksana kegiatan, juga berasal dari masyarakat.

Dari tantangan yang ada, sebagai perpanjangan tangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tidak akan terpaku hanya pada tantangan belaka, tapi tetap eksis dengan membuka peluang melakukan pengembangan pelayanan.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari organisasi adalah sebagai berikut :

□ **Tantangan**

1. Besarnya tuntutan masyarakat akan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan secara optimal, disebabkan oleh berbagai kendala dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik dari segi pembiayaan, sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia;
2. Penanganan terhadap berbagai masalah kesejahteraan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perlu diselenggarakan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat aktif;

3. Memfasilitasi untuk mencari solusi permasalahan yang ada antara OPD dengan OPD di Provinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antara OPD dengan masyarakat.

□ **Peluang Pengembangan Pelayanan**

1. Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta pelatihan khusus yang mendukung tupoksi organisasi.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.
3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sangat diprioritaskan bagi masyarakat dan sangat berpotensi terjadinya permasalahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Berdasarkan kondisi terkini dapat kami sampaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku yaitu :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Menurut Ususan Wajib Pelayanan Dasar

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	Pendidikan		
-	Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya akses pendidikan ke perguruan tinggi	Biaya pendidikan tinggi yang mahal terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah
II	Kesehatan dan Sosial		
-	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hidup sehat	Revolusi kesehatan yang belum direfleksikan dengan baik
		Dampak sosial terhadap penderita HIV/AIDS	Rendahnya pemahaman dan Kesadaran masyarakat terhadap penyebaran HIV/AIDS
-	Tumbuhnya paham-paham radikalisme dan intoleransi yang berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat	Nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sosial yang semakin menurun	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai luhur keagamaan
III	Kentrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
-	Nilai-nilai wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang semakin luntur	Belum terwujudnya Platform Bhinneka Tunggal Ika sebagai penuntun	Terkikisnya Nilai integritas, nilai etos kerja, dan gotong royong dalam

		kemajemukan sosial budaya.	kehidupan sosial masyarakat
		masih tingginya resiko konflik atau pertikaian antar masyarakat dengan latar belakang SARA	Agregasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Menurut Ususan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	Ketenagakerjaan		
-	Tingginya masalah perlindungan, upah, kesejahteraan, keadilan, perselisihan dan penyelesaiannya, pembinaan dan pengawasan serta peraturan yang mengatur bidang ketenaga kerjaan	Eksplotasi dan penerapan ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan UU	Rendahnya Pemahaman terhadap perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan oleh Perusahaan dan tenaga kerja
II	Ketransmigrasian		
	Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi	Kurang terjaminnya perlindungan dan pendampingan terhadap transmigrasi	Mengatasi angka kemiskinan, pengangguran dan pemukiman
III	Pangan		
-	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan	Rendahnya tingkat pemenuhan pangan bergizi bagi masyarakat miskin	Kemampuan daya beli masyarakat yang rendah
IV	Kependudukan dan Catatan Sipil		
-	Rendahnya kepemilikan data kependudukan tentang pengakatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak	Rendahnya pengawasan dan perlindungan anak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam upaya perwujudan tertib administrasi kependudukan

Gambaran permasalahan tersebut, sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, diharapkan akan mampu menjembatani dan mewujudkan fungsi Biro Kesra dalam pencapaian :

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan baik antar instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah.
2. Mewujudkan fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan yang berdaya saing.
3. Meningkatkan upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan
4. Meningkatkan pengembangan organisasi bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan
5. Optimalisasi pembinaan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Perumusan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku erat kaitannya dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur 2019 – 2024. Untuk itu, menelaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan tahapan penting dalam memahami arah pembangunan yang hendak dilaksanakan selama periode kepemimpinan. Gambaran tentang visi, misi dan program Prioritas RPJMD yang bertalian dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019– 2024 yaitu :

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”,

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019 – 2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani;

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau;

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik,

akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan;

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana

4. Peningkatan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Kepulauan ;

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku

5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata;

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri Dan Berprestasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan

prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (*no one left behind*).

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 yang telah diuraikan diatas, fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku dalam kaitannya dengan pencapaian visi misi Gubernur periode 2019 – 2024 adalah :

1. Bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan beragama di masyarakat
2. Bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan
3. Bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan & social serta bidang pendidikan.

Sedangkan kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, secara fungsi bergerak dalam upaya pencapaian visi melalui misi I, II, III, IV, V dan VI

Untuk itu upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan yang berlandaskan pada iman dan taqwa
2. Mengembangkan SDM berpendidikan tinggi yang berkualitas
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada upaya manajemen dan tata Kelola yang lebih maju dan mandiri
4. Mengembangkan SDM yang agamis, sehat, cerdas, kreatif dan trampil

3.2.2. Program Unggulan

Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019 – 2024, sehingga perlu menjadi perhatian untuk diimplementasikan serta melengkapi visi dan misi pembangunan daerah provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun mendatang, adalah:

1. Pemberdayaan Agen Perdamaian berbasis Agama dan Budaya Lokal
2. Beasiswa yang bersifat stimulan bagi Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA

Sebagai kesatuan implementasi visi dan misi pembangunan daerah pada priode 5 (lima) tahun kedepan, Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

1. Terwujudnya pelayanan terbaik dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan.
2. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais.
3. Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan local dan budaya daerah.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan indentifikasi faktor lokal penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh biro, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. *Kekuatan (Strengths).*

- a. Adanya dukungan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya Personil PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. Memiliki Perda dan Keputusan Gubernur Maluku tentang Tugas Pokok dan Fungsi

- d. Tersedianya Dana Operasional/Kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku

2. Kelemahan (Weakness).

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana internal khususnya kendaraan operasional dan perangkat teknologi informasi serta gedung dan bangunan.
- b. Teknologi program aplikasi informasi lokal belum memadai.
- c. Kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku untuk pengembangan kedepan.
- d. Inventarisasi data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku masih bersifat manual.

3. Peluang (Opportunities).

- a. Dukungan Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota terhadap peningkatan kualitas aparatur.
- b. Tersedianya teknologi pengembangan informasi lokal yang dibutuhkan.

Pernyataan Visi dan Misi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku memberikan arahan bagi seluruh Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kesejahteraan ASN menuju ASN yang professional.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam melaksanakan fungsinya bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan.

3.5 TELAHAN RENSTRA K/L

Biro Kesra Setda Maluku dengan fungsi yang diterima melakukan program dan kegiatan, yang secara lintas membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari setiap urusan yang dilakukan dalam menunjang fungsi perangkat daerah.

Pada tahun 2019 – 2024 renstra Biro Kesra Setda Provinsi Maluku diarahkan untuk menjawab Visi pembangunan daerah yang diwujudkan melalui misi pembangunan daerah. Perwujudan misi yang diinterpertasi melalui program pembangunan daerah pada urusan-urusan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan

Dengan memperhatikan setiap urusan yang dilaksanakan serta upaya mewujudkan sinergitas pembangunan pusat dan daerah maka penting, melalui Renstra Biro Kesra memperhatikan sasaran jangka menengah kementerian/lembaga yang dapat memberikan dampak bagi upaya menjalankan fungsi Biro Kesra, sebagai berikut :

i. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sasaran strategis yang berkorelasi dengan sasaran biro kesra : Meningkatnya relevansi kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan kinerja sasaran strategis tersebut maka ditetapkan sasaran program yang berkontribusi pada pencapaian Peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karier. Untuk mencapai sasaran strategis, maka faktor pendorong dan penghambat pada biro disajikan sebagai berikut :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
SS2	Rendahnya pendapatan masyarakat untuk membiayai biaya pendidikan pada perguruan tinggi	Meningkatkan cakupan layanan beasiswa bagi masyarakat miskin dan berprestasi

ii. Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis kemeterian kesehatan yang disenergikan dengan sasaran Biro Kesra Setda Maluku adalah meningkatnya pengendalian penyakit. Untuk mencapai sasaran tersebut maka factor pendorong dan penghambat yang menjadi telaah Renstra adalah :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Kesehatan	Optimalisasi fungsi pengendalian, pengawasan dan pencegahan penyakit

iii. Kementerian Sosial

Sasaran strategis kemeterian sosial yang disenergikan dengan sasaran Biro Kesra Setda Maluku adalah ocal penyelenggaraan kesejahteraan yang ocalional. Untuk mencapai sasaran tersebut maka factor pendorong dan penghambat yang telah Renstra adalah :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-	Belum terintegrasinya program-program daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan social	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

iv. Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran strategis kemeterian ketenagakerjaan yang disenergikan dengan sasaran Biro Kesra Setda Maluku adalah Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dan pengembangan lokal pengawasan ketenagakerjaan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka faktor pendorong dan penghambat yang yang menjadi telaah Renstra adalah :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-	Minimnya data perusahaan dan ketenagakerjaan di Maluku	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawan ketenagakerjaan dan Peraturan Menaker Nomor 33 Tahun 2016

v. Kementerian Pertanian

Sasaran strategis kemeterian Pertanian yang disenergikan dengan sasaran Biro Kesra Setda Maluku adalah Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula. Untuk mencapai sasaran tersebut maka factor pendorong dan penghambat yang yang menjadi telaah Renstra adalah :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-	Rendahnya pendapatan masyarakat dalam menjangkau pangan bergizi	Peningkatan cakupan layanan bantuan daging terutama kepada masyarakat miskin

vi. Kementerian Dalam Negeri

Sasaran strategis Kemeterian Dalam Negeri yang disenergikan dengan sasaran Biro Kesra Setda Maluku adalah Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut maka factor pendorong dan penghambat yang yang menjadi telaa Renstra adalah :

Kode	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-	Rendahnya kesadaran masyarakat terkait tertib data kependudukan terutama data kependudukan anak	Peningkatan kualitas layanan melalui ocal kependudukan yang terintegrasi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam pemberian layanan tidak memiliki pelayanan yang dapat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan

kelemahan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2019-2024) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan Revolusi Mental dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Peningkatan implementasi kesejahteraan sosial dalam hidup bermasyarakat terutama dalam mengatasi dan menangani masalah sosial.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan agama dan adat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan.
4. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah ditengah kehidupan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan lokal .
6. Peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter dilandasi nilai-nilai agama dan adat budaya serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
7. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
8. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
9. Optimalisasi penerapan kesetaraan gender dalam semua sektor pembangunan
10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Kesra baik jangka panjang maupun jangka pendek yaitu :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
3. Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah
4. Meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis
5. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai budaya local dan daerah
6. Meningkatkan kompetensi SDM dan koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan terutama perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berpresetasi
2. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat
3. Tersedianya data penderita HIV/AIDS
4. Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat

5. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi umat beragama
7. Meningkatnya rasa aman dan damai dalam masyarakat
8. Meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai nasionalisme
9. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan dan transmigrasi
10. Meningkatnya kinerja pendataan kependudukan

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah	Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan terutama perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi	Jumlah mahasiswa miskin dan beprestasi yang difasilitasi bantuan beasiswa	Orang	24	161	170	180	190	200
2.	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat	Jumlah Peserta penyuluhan yang peduli pentingnya lingkungan	Orang	80	150	150	200	200	250
		Tersedianya data penderita HIV/AIDS	Cakupan wilayah penyebaran HIV pada Kab/kota	%	20	20	20	20	20	100
3	Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat	Jumlah realisasi bantuan hewan qurban sesuai target	Jumlah	80	140	160	180	200	200
4	Meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dengan baik	Jumlah	3	3	3	3	3	3
		Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi umat beragama	Jumlah tokoh agama yang difasilitasi melaksanakan umroh dan wisata rohani	Orang	5	100	150	200	250	300

5	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai budaya local dan daerah	Meningkatnya rasa aman dan damai dalam masyarakat	Jumlah peserta kegiatan yang peduli pentingnya kantrantibmas	Orang	0	110	200	250	250	300
		Meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai nasionalisme	Presentase kegiatan hari-hari besar daerah yang terfasilitasi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatkan kompetensi SDM dan koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang social, budaya, ketenagakerjaan dan transmigrasi	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan dan transmigrasi	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami peraturan tentang ketenagakerjaan dan transmigrasi	Orang	80	150	150	200	200	250
		Meningkatnya kinerja pendataan kependudukan	Cakupan wilayah pendataan anak	%	0	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada RPJM Provinsi Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah.

Adapun strategi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah :

1. Bantuan beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi
2. Penyelarasan informasi tentang Gerakan Reformasi Kesehatan
3. Menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS melalui koordinasi dengan lembaga terkait
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi
5. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama
6. Menyamakan persepsi rasa aman dan damai dalam masyarakat
7. Penyelarasan informasi tentang perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi
8. Koordinasi dalam rangka menyelaraskan kesejahteraan pekerja
9. Validasi data kependudukan

Sedangkan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan:

1. Memastikan masyarakat miskin lebih mudah mengakses layanan pendidikan terutama perguruan tinggi
2. Kemampuan Masyarakat dalam mengimplementasikan lingkungan bersih dan sehat
3. Kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS
4. Perluasan cakupan bantuan hewan qurban bagi masyarakat miskin
5. Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai modal pelaksanaan pembangunan di daerah

6. Meningkatkan partisipasi tokoh agama dan lembaga keumatan dalam menjaga keamanan bersama
7. Memaksimalisasi factor budaya local guna menciptakan rasa aman dan damai dalam bermasyarakat
8. Kepastian dan jaminan hukum bidang ketenakerjaan dan transmigrasi
9. Kesadaran masyarakat membantu meningkatnya kinerja pendataan penduduk

Strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, tujuan serta yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Maluku dapat digambarkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :		Maluku Yang terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau				
1	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan terutama perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi	Bantuan beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi	Memastikan masyarakat miskin lebih mudah mengakses layanan pendidikan terutama perguruan tinggi
2	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat	Penyelarasan informasi tentang Gerakan Reformasi Kesehatan	Kemampuan Masyarakat dalam mengimplementasikan lingkungan bersih dan sehat
		Tersedianya data penderita HIV/AIDS	Pendampingan kepada penderita HIV/AIDS melalui koordinasi dengan lembaga terkait	Kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial penyakit HIV/AIDS
Misi 3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan				
1	Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah	Meningkatkannya kemampuan pangan masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi	Perluasan cakupan bantuan hewan qurban bagi masyarakat miskin
Misi 5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata				

1	Meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Meningkatnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai modal pelaksanaan pembangunan di daerah
		Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi umat beragama		Meningkatkan partisipasi tokoh agama dan lembaga keumatan dalam menjaga keamanan Bersama
2	Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya local dan daerah	Meningkatnya rasa aman damai dalam masyarakat	Menyamakan persepsi rasa aman dan damai dalam bermasyarakat	Memaksimalkan factor budaya local guna menciptakan rasa aman dan damai dalam bermasyarakat
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai nasionalisme		
3	Meningkatkan kompetensi SDM dan koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang social, budaya, ketenagakerjaan dan transmigrasi	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan dan transmigrasi	Penyelarasan informasi tentang perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi	Kepastian dan jaminan hukum bidang ketenakerjaan dan transmigrasi
		Meningkatnya keterpaduan antar pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	Koordinasi dalam rangka menyelaraskan kesejahteraan pekerja	Penyatuan persepsi dan pemahaman untuk mencapai tujuan pembangunan
		Meningkatnya kinerja pendataan kependudukan	Validasi data kependudukan	Kesadaran masyarakat membantu meningkatkan kinerja pendataan penduduk

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Maluku, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi maka Biro Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2019-2024 mengusung program dan kegiatan yang ideal. Program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku adalah :

1. Program

Program prioritas pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Kesejahteraan Rakyat

2. Kegiatan

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1). Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1). Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

- 2). Penyediaan peralatan rumah tangga

- 3). Penyediaan bahan logistic kantor

- 4). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 5). Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 2). Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:

- 1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- 2). Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

5. Fasilitas Keprotokolan

Sub Kegiatan:

- 1). Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan acara

2) Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Sub Kegiatan :

- 1). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
- 2). Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

2. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Sub Kegiatan:

- 1). Fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan.
- 2). Fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan.
- 3). Fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang social.

3. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Sub Kegiatan:

- 1). Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
- 2). Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.

Untuk selanjutnya dapat digambarkan program, kegiatan serta pendanaannya dengan tabel dibawah ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Adanya Peningkatan Kualitas SDM Biro	Orang		7	115.325.000	7	121.100.000	8	127.155.000	8	133.515.000		
01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		1	174.400.160	1	183.120.000	1	192.276.000	1	201.890.000		
01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran Adminitrasi Perkantoran	bulan		12	4.221.360	12	4.432.500	12	4.654.000	12	4.886.000		
01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelancaran Adminitrasi Perkantoran	jenis		40	51.791.217	40	54.750.000	40	57.298.000	40	60.165.000		
01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelancaran Adminitrasi Perkantoran	bulan		12	28.459.900	12	29.882.000	12	31.377.000	12	32.495.000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya Sinkronisasi Program dan Kegiatan	Orang			10	155.450.000	10	163.222.500	10	171.383.000	11	180.250.000	
01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan													
01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Presentase kegiatan hari-hari besar Nasional yang terfasilitasi dengan baik	Kegiatan			3	824.776.932	3	866.015.700	3	909.316.500	3	954.782.000	
01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT													
01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual													
01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Tersedianya Bantuan hibah	Paket			1	100.677.295.714	1	105.711.160.000	1	110.996.718.000	1	116.546.554.000	
02	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Realisasi Bantuan Hewan Qurban sesuai Target	Paket			1	1.625.395.633	1	1.706.665.400	1	1.791.998.600	1	1.881.598.600	
01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar													
01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Mahasiswa yang di Fasilitasi Bantuan Pendidikan	Paket			1	5.342.632.682	1	5.609.764.000	1	5.890.252.500	1	6.184.765.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terfasilitasi ya Koordinasi di bidang Kesehatan	Orang			60	446.006.552	60	468.306.800	60	491.722.000	60	516.308.300	
01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah tokoh agama yang di fasilitasi melaksanakan ibadah Umroh dan Wisata Rohani dan Safari Keagamaan	Paket			1	4.877.436.428	1	4.121.308.200	1	5.377.373.600	1	5.646.242.300	
01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar													
01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Peserta kegiatan pembinaan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kalangan Masyarakat	Orang			60	456.180.898	60	478.989.900	60	502.939.400	60	528.086.400	
01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terkoordinasi kegiatan Ketenagakerjaan dan Kependudukan pada masyarakat	Paket			1	608.573.511	1	639.002.000	1	670.952.200	1	704.499.900	

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja yang ingin di capai dalam 5 tahun mendatang (2019 – 2024) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam table berikut ini:

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD								
NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Jumlah Mahasiswa yang di Fasilitas Bantuan Beasiswa	24	161	170	180	190	200	100
2	Cakupan wilayah penyebaran HIV / AIDS di Provinsi Maluku	4	4	4	4	4	4	100
3	Jumlah Peserta Penyuluhan yang peduli pentingnya Lingkungan Sehat	80	150	150	200	200	250	100
4	Jumlah Peserta kegiatan Pembinaan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	0	110	200	200	250	250	100
5	Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi melaksanakan ibadah Umroh dan Wisata Rohani	0	100	150	150	200	200	100
6	Presentasi Kegiatan hari-hari besar Nasional yang terfasilitasi dengan baik	0	3	3	3	3	3	100
7	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi dengan baik	3	3	3	3	3	3	100
8	Jumlah Realisasi Bantuan Hewan Qurban sesuai Target	80	140	200	250	250	300	100
9	Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Peraturan tentang Ketenagakerjaan	80	150	150	200	200	250	100
10	Cakupan wilayah Pendataan Anak	0	8	11	11	11	11	100

Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku . Rencana Strategis ini merupakan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang memberikan gambaran tentang Isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.